

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi semakin maju membawa banyak perubahan. Pemerintah Indonesia mengupayakan masyarakat agar memperoleh layanan pendidikan lebih maju dan sejahtera. Pendidikan merupakan salah satu indikator utama pembangunan dan kualitas sumber daya manusia, sehingga kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Pendidikan merupakan bidang yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional, karena merupakan salah satu penentu kemajuan suatu bangsa. Pendidikan bahkan merupakan sarana paling efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesejahteraan masyarakat, serta yang dapat mengantarkan bangsa mencapai kemakmuran. Dalam pembukaan UUD 1945 telah dinyatakan secara tegas bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu cara untuk dapat mencapai tujuan tersebut yaitu dengan pendidikan. Dimana pendidikan adalah hak asasi setiap warga negara, yang sangat berperan penting bagi kesuksesan dan kesinambungan pembangunan suatu bangsa. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31, ayat 1 yang berbunyi "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan", ayat 2 yang berbunyi "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.". Berdasarkan pasal tersebut, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, dan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Selain itu, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa menyatakan bahwa untuk peserta didik yang memiliki potensi dan prestasi mengharumkan nama bangsa, negara, daerah, dan satuan pendidikannya, diperlukan sistem pembinaan agar dapat mengaktualisasikan potensi dan bakatnya tersebut. Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan, Pasal 1 memuat bahwa tujuan pembinaan antara lain adalah untuk mengembangkan potensi siswa secara optimal dan terpadu yang meliputi bakat, minat, dan kreativitas siswa.

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa : “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tersebut diharapkan pendidikan menjadi landasan kuat yang diperlukan untuk meraih kemajuan bangsa di masa depan, bahkan lebih penting lagi sebagai bekal dalam menghadapi era global dengan persaingan antar bangsa yang berlangsung sangat ketat. Dengan demikian, pendidikan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi karena pendidikan merupakan faktor penentu suatu bangsa untuk bisa memenangkan kompetisi global. Pemerintah Indonesia secara formal telah mengupayakan pemerataan pendidikan mulai dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah, dilanjutkan dengan wajib belajar pendidikan anak dua belas tahun. Upaya- upaya ini nampaknya lebih mengacu pada perluasan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Pemerataan pendidikan dilakukan dengan mengupayakan agar semua lapisan masyarakat dapat menikmati pendidikan tanpa mengenal usia, waktu, tempat mereka tinggal yakni baik dikota maupun desa tetap sama.

Menurut Dwi Siswoyo (2011:17) pendidikan memainkan peranan yang penting didalam drama kehidupan dan kemajuan umat manusia. Pendidikan merupakan suatu yang dinamis dalam kehidupan setiap individu, yang mempengaruhi perkembangan fisiknya, daya jiwanya (akal, rasa dan kehendak), sosialnya dan moralitasnya. Pendidikan merupakan suatu kekuatan yang dinamis dalam mempengaruhi kemampuan, kepribadian dan kehidupan individu dalam pertemuan dan pergaulannya dengan sesama dan dunia, serta dalam hubungannya dengan Tuhan. Pendidikan menurut Redja Mudyahardjo dalam Rulam Ahmadi (2014:37) adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah No 25 tahun 2005 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan provinsi sebagai daerah otonom khususnya pasal 3a bahwa penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang dan tidak mampu menjadi tanggung jawab daerah. Pemerintah daerah memahami situasi wilayahnya untuk menentukan kebijakan pendidikan terutama pemerataan pendidikan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah 25 Tahun 2005, maka semua warga Negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran tanpa terkecuali, baik orang kaya maupun orang miskin dan masyarakat perkotaan maupun pedesaan (terpencil). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meluncurkan kebijakan Kartu Indonesia Pintar sebagai salah satu upaya perluasan pemerataan pendidikan dengan membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan (TNP2K). Tujuan dari Program tersebut adalah untuk membantu siswa miskin untuk memperoleh pendidikan yang layak, mencegah anak putus sekolah, serta memenuhi kebutuhan sekolah mereka. Kebijakan Kartu Indonesia Pintar merupakan bagian dari Program Indonesia Pintar, hal ini merupakan sebagai kelanjutan dan perluasan sasaran dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah tentang Wajib Belajar Sembilan Tahun. Dalam perkembangannya, kepala daerah ingin memfasilitasi program pendidikan tidak hanya sembilan tahun bahkan menerbitkan Peraturan Daerah tentang Wajib Belajar 12 Tahun. Tujuannya agar indeks kualitasnya warganya meningkat.

Bantuan Siswa Miskin (BSM) merupakan subsidi uang tunai dari Pemerintah kepada siswa miskin dengan cara menanggung sebagian biaya pribadi pendidikan siswa, seperti pembelian sepatu, transportasi, dan baju seragam agar siswa dapat terus melanjutkan pendidikan. Bentuk subsidi ini sebagai salah satu skema pembiayaan pendidikan yang bersifat social charity bagi kelompok masyarakat yang rentan dalam kelangsungannya memperoleh pelayanan pendidikan. Pemberian subsidi siswa miskin merupakan kebijakan publik dalam rangka perluasan akses pendidikan yang bermutu bagi semua warga negara tanpa kecuali. Masih tingginya angka putus sekolah dan tidak dapat melanjutkan pendidikan itu lebih banyak bersumber pada persoalan ekonomi, karena banyak di antara anak-anak usia sekolah dasar itu berasal dari keluarga miskin. Kenaikan biaya pendidikan semakin sulit diatasi oleh kemampuan penyediaan dana pemerintah maupun masyarakat. Peningkatan biaya itu mengancam akses dan mutu pelayanan pendidikan dan karenanya harus dicari solusi untuk mengatasi masalah pembiayaan pendidikan ini. Pada jenjang pendidikan dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan bantuan subsidi siswa miskin melalui program BSM SD dan SMP. Pemberian bantuan bertujuan tersebut memberikan layanan pendidikan bagi penduduk miskin untuk dapat memenuhi kebutuhannya di bidang pendidikan, agar siswa yang orangtuanya tidak mampu/miskin tersebut dapat tetap memperoleh

pendidikan. Hal ini juga dalam rangka mendukung pencapaian Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Tujuan BSM, baik di satuan pendidikan dasar maupun menengah ialah untuk mengurangi halangan pendidikan karena masalah biaya (cost barrier), mencegah terjadinya putus sekolah dan mengulang kelas (mengurangi APS dan AMK), memberikan kesempatan kepada siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, mendukung terwujudnya penuntasan Wajib 9 tahun dan terwujudnya kebijakan Pendidikan Menengah Universal/PMU. Penerima BSM, yaitu siswa dari keluarga miskin yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan (dibuktikan dengan surat keterangan miskin dan atau PKH, yatim dan/atau piatu, orangtua terkena musibah/PHK), memiliki saudara yang masih sekolah lebih dari tiga orang, siswa berpotensi putus sekolah atau mengulang kelas, berkepribadian baik, dan siswa berpotensi/pandai (Dirjen Mandikdasmen 2010, Depkeu, 2012 dan Dirjen Dikmen, 2012).

Tentang Program Indonesia Pintar (PIP) adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan. Adapun Masyarakat miskin adalah suatu kondisi dimana fisik masyarakat yang tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh di bawah standar kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu yang mencakup seluruh multidimensi, yaitu dimensi politik, dimensi sosial, dimensi lingkungan, dimensi ekonomi dan dimensi asset (P2 KP, Pedoman Umum, 2004:1). Penggolongan kemiskinan didasarkan pada suatu standar tertentu yaitu dengan membandingkan tingkat pendapatan orang atau keluarga dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum. Berdasarkan kriteria ini, maka dikenal kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.

Program Indonesia Pintar (PIP) mulai tahun 2015 berdasarkan Permendikbud Nomor 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar (PIP), yang mana ditetapkan dan mulai diundangkan pada tanggal 12 Mei 2015, PIP diselenggarakan dalam rangka melaksanakan ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat untuk membangun keluarga produktif. Kartu Indonesia Pintar, yang selanjutnya disebut KIP adalah kartu yang diberikan kepada anak dari keluarga pemegang Kartu

Perlindungan Sosial (KPS) / Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai penanda/identitas untuk mendapatkan manfaat PIP dan pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang mempunyai komitmen dan kepedulian terhadap kemajuan pendidikan baik formal maupun non formal. Program Indonesia Pintar melalui KIP menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah (6-20 Tahun) yang berasal dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Program Indonesia Pintar melalui KIP merupakan penyempurnaan dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) sebelumnya. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disebut PIP adalah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak atau kurang mampu membiayai pendidikannya, sebagai kelanjutan dan perluasan sasaran dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Pemerintah memberikan bantuan pendidikan berupa Program Indonesia Pintar bagi anak-anak miskin yang rawan putus sekolah agar dapat mencukupi kebutuhan pendidikan siswa diluar biaya operasional sekolah. Melalui program ini pemerintah berupaya mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah, dan diharapkan dapat menarik siswa putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikannya. misalnya untuk membeli perlengkapan sekolah, biaya transportasi, uang saku, dan lain-lain.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar, bagi pendidikan dasar dan menengah PIP bertujuan yaitu meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun, mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi, dan/atau menarik siswa putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah, sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, lembaga kursus dan pelatihan, satuan pendidikan nonformal lainnya, atau balai latihan kerja pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Program Indonesia Pintar juga merupakan salah satu program nasional (tercantum dalam RPJMN 2015- 2019) yang bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah, meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus

sekolah dan angka melanjutkan, menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara wilayah perkotaan dan perdesaan, dan antar daerah, dan meningkatkan kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Program PIP ditujukan untuk membantu biaya pribadi peserta didik agar dapat terus melanjutkan pendidikannya sampai selesai jenjang pendidikan menengah. Dana bantuan diberikan langsung kepada siswa dengan untuk pemanfaatan sebagai berikut: (1) Pembelian buku dan alat tulis sekolah, (2) Pembelian pakaian, (3) Pembelian perlengkapan sekolah (sepatu, tas, dll), (4) Biaya transportasi siswa ke sekolah, (5) Uang saku siswa, (6) Luran siswa, dan (7) Biaya kursus/les tambahan. PIP dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip: (a) efisien, yaitu menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu singkat, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan; (b) efektif, yaitu sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan; (c) transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai PIP; (d) akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan; (e) kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan, (e) manfaat, yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional.

Melalui program PIP tersebut, pemerintah berupaya untuk mencegah peserta didik putus sekolah dengan adanya PIP. Pemerintah juga berharap dapat membuat peserta didik yang putus sekolah untuk dapat melanjutkan kembali pendidikannya. Program Indonesia Pintar dapat dikatakan berhasil manakala tujuan yang dicapai melalui implementasi yang disiplin dan tertib. Salah satu hal yang harus diaplikasikan adalah pemanfaatan dana sesuai peruntukannya. Agar semua dana tersalurkan secara benar dengan aturan yang ada. Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) ini sendiri disalurkan memalui dua bank Hibana yang ditunjuk pemerintah yaitu bank BRI dan BNI. Dan untuk mencairkan dana bantuannya tentu penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) harus memiliki rekening di salah satu dari dua bank tersebut. Untuk penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) jenjang SD, SMP, SMA/SMK, Paket A, Paket B, Paket C dan pendidikan khusus, bisa mencairkan di BRI. Maka dari itu Program Indonesia Pintar (PIP) sangat penting bagi kemajuan pendidikan saat ini

Pendidikan menengah kejuruan adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu. Pendidikan menengah kejuruan mengutamakan pernyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional. Sesuai dengan bentuknya, sekolah menengah kejuruan dengan jenis-jenis lapangan kerja (Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990). SMK menyediakan banyak program keahlian. Program keahlian yang dilaksanakan ini menyesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja yang ada. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik agar siap bekerja dalam bidang tertentu.

Program penyaluran Bantuan PIP siswa SMK dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip 3T, yaitu Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, dan Tepat Waktu, sehingga diharapkan para pemangku kepentingan dalam melakukan sosialisasi dan penyaluran Bantuan PIP siswa SMK mengacu pada pedoman teknis ini. Penerbitan pedoman teknis program Bantuan PIP Siswa SMK ini diharapkan dapat memudahkan bagi pemangku kepentingan (stakeholder) agar penyaluran bantuan tersebut kepada siswa dapat tercapai sesuai dengan harapan kita semua. Selain itu, pedoman teknis ini diharapkan juga dapat memudahkan bagi para siswa yang telah ditetapkan sebagai Penerima Bantuan PIP untuk mendapatkan haknya. Dengan terbitnya pedoman ini, proses penyaluran Bantuan diharapkan akan berjalan dengan lebih baik dan siswa dapat menyelesaikan studinya dengan lancar, berprestasi tepat waktu, yang pada akhirnya dapat ikut andil dalam meneruskan perjuangan bangsa menuju pembangunan Indonesia sejahtera.

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang berlokasi di Kabupaten Boyolali merupakan salah satu penerima Bantuan Program Indonesia Pintar dari Pemerintah. Pemberian PIP ini dilakukan untuk membantu siswa yang tidak mampu selama menempuh studinya. Dalam proses rekomendasi penerima bantuan siswa miskin ada beberapa kriteria yang ditentukan oleh pihak sekolah yaitu seperti kriteria status kartu, penghasilan orang tua, tanggungan orang tua, tanggungan anak sekolah dan nilai rata-rata raport. Proses yang dilakukan dalam seleksi dimulai dari pihak kurikulum merekap kriteria-kriteria yang telah ditentukan kemudian dijadikan bahan rapat antara petugas TU dan staf program bantuan dan diusulkan untuk menetapkan siswa yang layak mendapatkan penerima bantuan. Hal ini membutuhkan ketelitian dari bagian kurikulum dalam merekap data siswa berdasarkan data status kartu, data penghasilan orang tua, banyaknya jumlah tanggungan orang tua, status anak dan nilai rata-rata raport yang diperoleh.

Kemudian proses rekomendasi bantuan siswa miskin saat ini tidak ada perhitungan khusus dan pembobotan setiap kriteria. Untuk itu dibutuhkan suatu Sistem Penunjang Keputusan (SPK) sehingga keputusan yang diperoleh lebih akurat. Metode perhitungan sistem penunjang keputusan yang digunakan yaitu metode Simple Additive Weighting (SAW). Dengan menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW) proses penilaian bisa lebih tepat, karena berdasarkan pada nilai kriteria dan bobot tingkat kepentingan yang dibutuhkan dan juga bobot nilai bisa ditentukan sendiri oleh pengambil keputusan.

Metode ini juga sering dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif dari semua atribut. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matrik keputusan (X) ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Proses perankingan tersebut, diharapkan penilaian akan lebih tepat karena didasarkan pada nilai kriteria dan bobot yang sudah ditentukan sehingga akan mendapatkan hasil yang lebih akurat terhadap siapa yang akan direkomendasikan untuk menerima bantuan. Langkah Penyelesaian Simple Additive Weighting (SAW), sebagai berikut : menentukan kriteria kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu C_i . Menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria. Membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria(C_i), kemudian melakukan normalisasi matriks berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut (atribut keuntungan ataupun atribut biaya) sehingga diperoleh matriks ternormalisasi R . Hasil akhir diperoleh dari proses perankingan yaitu penjumlahan dari perkalian matriks ternormalisasi R dengan vektor bobot sehingga diperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai alternatif terbaik (A_i), sebagai solusi.

Pada penelitian ini peneliti mencoba untuk melakukan alternatif perhitungan dengan bobot kriteria untuk rekomendasi penerima bantuan siswa miskin, sehingga membantu pengambilan keputusan petugas tu dan staf program bantuan. Alternatif perhitungan bobot untuk menentukan penerima bantuan siswa miskin bertujuan untuk mengetahui siswa yang memenuhi kriteria yang layak untuk mendapatkan bantuan PIP. Berdasarkan uraian diatas dituangkan skripsi dengan judul **“Penerapan Metode Simple Additive Weighting (SAW) untuk Rekomendasi Penerima Bantuan Siswa Miskin di Sekolah Menengah Kejuruan”**

B. Permasalahan

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang berlokasi di Kabupaten Boyolali merupakan salah satu penerima Bantuan Program Indonesia Pintar dari Pemerintah. Pemberian PIP ini dilakukan untuk membantu siswa yang tidak mampu selama menempuh studinya

Masalah yang terjadi umumnya adalah dimana setiap sekolah selalu melakukan pemilihan siswa yang bertujuan untuk menentukan siapa saja yang mendapatkan rekomendasi penerima bantuan PIP dan bisa menjadikan patokan dalam rekomendasi siswa yang berhak diajukan untuk mendapatkan bantuan, dalam proses rekomendasi tersebut yang saat ini banyak dilakukan adalah dengan cara memilih siswa tanpa memprioritaskan data penghasilan orang tua siswa, jumlah tanggungan orang tua siswa yang banyak dan status siswa dalam keluarga (yatim atau piatu). Dengan melakukan tindakan seperti ini bisa mengakibatkan bahwa pengambilan keputusan tersebut tidaklah kuat.

Sering terjadinya ketidaksesuaian rekomendasi penerima bantuan pada setiap siswa, dimana dari setiap penilaian siswa hanya di rekap individu tidak berdasarkan jurusan dari siswa tersebut dan pihak petugas TU belum menentukan bobot pada setiap kriteria-kriteria penilaian yang ada. Ini merupakan permasalahan serius yang berhubungan dengan kenyamanan dan keadilan bagi setiap siswa. Pada Tabel 1.1 di tampilkan data siswa, data ini diambil dari salah satu objek penelitian yang mewakili semua siswa dengan jurusan tertentu.

Tabel 1. 1 Tabel Data Siswa Rekomendasi Penerima Bantuan

No	Nama Siswa	NISN	Jenis Kelamin	Jurusan	Kepemilikan Kartu
1	ADHITYA EKA PRASETYA	0064239142	Laki-laki	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	Tidak memiliki Kartu
2	AGUNG NUR SENO	0067301909	Laki-laki	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	KIP
3	AHMAD NUR AMIN	0061066463	Laki-laki	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	Tidak memiliki Kartu
4	ARDIYANTO	0066840422	Laki-laki	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	KIP
5	ARYA BIMA ADYATMA ASTOPO	0067298796	Laki-laki	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	SKTM
6	AULIA DWI NATA	0063961454	Perempuan	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	SKTM
7	BAGAS WICAKSONO	0069562990	Laki-laki	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	KIP
8	BAGUS SAJWO	0062021475	Laki-laki	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	KIP
9	DANANG AJI PRAJANTO	0065395917	Laki-laki	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	SKTM
10	DAVIN SURYA SAYEKTI	0064285835	Laki-laki	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	KIP
11	EKZAN MUHAMAD MAHRUB	0075535188	Laki-laki	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	Tidak memiliki Kartu
12	ELHAM NUR ROHMAN	0063235376	Laki-laki	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	KIP
13	EVA SALSABILA	0065763187	Perempuan	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	SKTM
14	FEBRIAN INDRA PERMANA	0063268444	Laki-laki	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	SKTM
15	FINA LUNA CAHYANI	0065782516	Perempuan	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	SKTM
16	GALUH INTAN VIRGINIA	0085279710	Laki-laki	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	KIP
17	GILANG FEBRIANTO PUTRA	0065115999	Laki-laki	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	SKTM
18	GITA AGUSTINA	0065417471	Perempuan	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	KIP
19	INDRA SETIA BUDI	0068511222	Laki-laki	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	KIP
20	KHOIRUL ROHMAN	0057007116	Laki-laki	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	SKTM
21	M.DZAKI FARUQI ALGIFARI	3073279884	Laki-laki	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	SKTM
22	MAHENDRA ERWIN DWI ARDIYANSYAH	0072866301	Laki-laki	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	Tidak memiliki Kartu
23	MAULIDA DWI SETIYA FANI	0067256561	Perempuan	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	SKTM
24	MUHAMMAD DANI FADILAH	3064252658	Laki-laki	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	Tidak memiliki Kartu
25	MUHAMMAD RIDHO WUANARKO	0065202482	Laki-laki	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	SKTM
26	NISYA KHAILYA FITRI	0065288791	Perempuan	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	Tidak memiliki Kartu
27	NOVA RYAN AZIZ PRATAMA	0055275936	Laki-laki	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	Tidak memiliki Kartu
28	NUR LITA	0089184014	Perempuan	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	KIP
29	REIZZA WADARYA	0061653260	Laki-laki	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	KIP
30	RISKA ERLITA SARI	0057421501	Laki-laki	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	KIP
31	RIVAN MAULANA	0068602346	Laki-laki	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	SKTM
32	SITI NUR AISYAH	0063133087	Perempuan	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	SKTM
33	SUCI RAMANDAWATI	0061228234	Perempuan	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	SKTM
34	SYAHRUL RAMADHAN	0065764176	Laki-laki	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	SKTM
35	WAHYU SATRIO	0066615478	Laki-laki	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	Tidak memiliki Kartu

Pada tabel 1.1 diperoleh data siswa antara jurusan yang sama. Pada Tabel 1.2 di tampilkan data detail dari setiap siswa pada jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik.

Tabel 1. 2 Data Detail Siswa Tahun 2021- 2022

No	Nama Siswa	Status Kartu	Penghasilan Orang Tua	Jumlah Tanggungan	Status Anak	Nilai Rata-rata Raport	Rata-rata	Peringkat	Keterangan				
1	ADHITYA EKA PRASETYA	Tidak memiliki Kartu	2	3-4 jt	2	2 Anak	2	Orang Tua Lengkap	2	84	18,30	25	Tidak diajukan
2	AGUNG NUR SENO	KIP	4	3-4 jt	2	3 Anak	3	Orang Tua Lengkap	2	87	19,52	4	Diajukan
3	AHMAD NUR AMIN	Tidak memiliki Kartu	2	> 4 jt	1	4 Anak	4	Orang Tua Lengkap	2	84	18,62	20	Tidak diajukan
4	APDIYANTO	KIP	4	> 4 jt	1	3 Anak	3	Orang Tua Lengkap	2	83	18,58	21	Tidak diajukan
5	ARYA BIMA ADYATMA ASTOPO	SKTM	3	2-3 jt	3	2 Anak	2	Orang Tua Lengkap	2	86	19,24	9	Tidak diajukan
6	AULIA DWINATA	SKTM	3	1-2 jt	4	1 Anak	1	Orang Tua Lengkap	2	84	18,82	17	Tidak diajukan
7	BAGAS WICAKSONO	KIP	4	2-3 jt	3	2 Anak	2	Piatu	3	84	19,10	12	Tidak diajukan
8	BAGUS SAJIWO	KIP	4	> 4 jt	1	4 Anak	4	Orang Tua Lengkap	2	87	19,52	4	Diajukan
9	DANANG AJI PRAJANTO	SKTM	3	> 4 jt	1	3 Anak	3	Orang Tua Lengkap	2	86	19,04	13	Tidak diajukan
10	DAVIN SURYA SAYEKTI	KIP	4	2-3 jt	3	3 Anak	3	Orang Tua Lengkap	2	84	19,22	10	Tidak diajukan
11	EKZAN MUHAMMAD MAHRUB	Tidak memiliki Kartu	2	3-4 jt	2	3 Anak	3	Orang Tua Lengkap	2	83	18,38	24	Tidak diajukan
12	ELHAM NUR ROHMAN	KIP	4	2-3 jt	3	1 Anak	1	Orang Tua Lengkap	2	84	18,82	17	Tidak diajukan
13	EVA SALSABILA	SKTM	3	> 4 jt	1	5 Anak	5	Orang Tua Lengkap	2	87	19,52	4	Diajukan
14	FEBRIAN INDRA PERMANA	SKTM	3	> 4 jt	1	1 Anak	1	Orang Tua Lengkap	2	86	18,64	19	Tidak diajukan
15	FINA LUNA CAHYANI	SKTM	3	> 4 jt	1	4 Anak	4	Orang Tua Lengkap	2	86	19,24	9	Tidak diajukan
16	GALUH INTAN FIRGINIA	KIP	4	3-4 jt	2	4 Anak	4	Orang Tua Lengkap	2	85	19,34	7	Diajukan
17	GILANG FEBRIANTO PUTRA	SKTM	3	3-4 jt	2	4 Anak	4	Orang Tua Lengkap	2	83	18,70	18	Tidak diajukan
18	GITA AGUSTINA	KIP	4	2-3 jt	3	4 Anak	4	Piatu	3	86	20,04	1	Diajukan
19	INDRA SETIA BUDI	KIP	4	1-2 jt	4	3 Anak	3	Yatim	4	83	19,58	2	Diajukan
20	KHOIRUL ROHMAN	SKTM	3	2-3 jt	3	1 Anak	1	Orang Tua Lengkap	2	84	18,50	22	Tidak diajukan
21	MOZAKI FARUQI ALGIFARI	SKTM	3	2-3 jt	3	4 Anak	4	Orang Tua Lengkap	2	83	18,98	15	Tidak diajukan
22	MAHENDRA ERWIN DWI ARDIYANSYAH	Tidak memiliki Kartu	2	> 4 jt	1	2 Anak	2	Orang Tua Lengkap	2	84	18,10	26	Tidak diajukan
23	MAULIDA DWI SETIYA FANI	SKTM	3	3-4 jt	2	1 Anak	1	Orang Tua Lengkap	2	88	19,24	9	Tidak diajukan
24	MUHAMMAD DANI FADILAH	Tidak memiliki Kartu	2	2-3 jt	3	2 Anak	2	Orang Tua Lengkap	2	84	18,62	20	Tidak diajukan
25	MUHAMMAD RIDHO WJANARKO	SKTM	3	> 4 jt	1	2 Anak	2	Orang Tua Lengkap	2	84	18,42	23	Tidak diajukan
26	NISYA KHAILYA FITRI	Tidak memiliki Kartu	2	2-3 jt	3	3 Anak	3	Orang Tua Lengkap	2	88	19,56	3	Diajukan
27	NDYA RYAN AZIZ PRATAMA	Tidak memiliki Kartu	2	1-2 jt	4	2 Anak	2	Orang Tua Lengkap	2	84	18,82	17	Tidak diajukan
28	NUR LITA	KIP	4	3-4 jt	2	1 Anak	1	Orang Tua Lengkap	2	88	19,36	6	Diajukan
29	REIZZA WADAFIYA	KIP	4	2-3 jt	3	2 Anak	2	Orang Tua Lengkap	2	84	19,02	14	Tidak diajukan
30	RISKA ERLITA SARI	KIP	4	> 4 jt	1	2 Anak	2	Orang Tua Lengkap	2	87	19,24	9	Tidak diajukan
31	RIVAN MAULANA	SKTM	3	2-3 jt	3	3 Anak	3	Yatim	4	84	19,42	5	Diajukan
32	SITI NUR AISYAH	SKTM	3	3-4 jt	2	3 Anak	3	Orang Tua Lengkap	2	86	19,24	9	Tidak diajukan
33	SUCI RAMANDAVATI	SKTM	3	2-3 jt	3	4 Anak	4	Yatim	4	83	19,30	8	Diajukan
34	SYAHRUL RAMADHAN	SKTM	3	1-2 jt	4	4 Anak	4	Orang Tua Lengkap	2	83	19,18	11	Tidak diajukan
35	WAHYU SATRIO	Tidak memiliki Kartu	2	> 4 jt	1	3 Anak	3	Orang Tua Lengkap	2	86	18,84	16	Tidak diajukan

Dapat dilihat pada tabel 1.2 keterangan rekomendasi penerima bantuan menunjukkan hanya sebagian siswa yang diajukan, namun pada keterangan siswa yang diajukan ada beberapa nama yang nilainya biru dimana siswa yang bernama Gita Agustina dengan penghasilan orang tua lebih tinggi terpilih sebagai siswa yang direkomendasikan untuk penerima bantuan dengan hasil rata-rata paling tinggi sedangkan jika di bandingkan dengan siswa yang bernama Indra Setia Budi dengan jumlah penghasilan orang tua lebih rendah mendapatkan nilai rata-rata lebih rendah, apabila kita menggunakan metode SAW maka siswa yang benar-benar diajukan dan tidaknya untuk mendapatkan bantuan bisa diketahui secara jelas karena bisa melihat keseluruhan nilai pada jurusan tertentu. Hal ini disebabkan karena setiap petugas TU belum memiliki bobot pada kriteria-kriteria penilaian siswa yang mengakibatkan penilaian siswa masih menggunakan metode standart dan hasil akhir penentuan rekomendasi siswa untuk menerima bantuan belum memprioritaskan data penghasilan orang tua, jumlah tanggungan orang tua siswa yang banyak dan status siswa dalam keluarga (yatim atau piatu). Rekomendasi penerima bantuan saat ini dirasa kurang tepat dan belum akurat yang dimana datanya belum bisa dipertanggung jawabkan.

Ditambah lagi setiap tahunnya akan selalu dilakukan pengajuan untuk siswa yang akan mendapatkan bantuan PIP. Apabila kegiatan ini terus dilakukan tanpa ada perubahan maka kemungkinan besar siswa yang dipilih untuk mendapatkan bantuan tidak mencapai standar yang diinginkan dan tidak memperoleh kandidat yang terbaik untuk mendapatkan rekomendasi bantuan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan tidak tepatnya dalam rekomendasi penerima bantuan siswa miskin di Sekolah Menengah Kejuruan.

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas maka dapat disimpulkan identifikasi masalah yaitu:

- (a) belum tepat dalam rekomendasi penerima bantuan siswa miskin;
- (b) belum efektif proses rekomendasi penerima bantuan siswa miskin.

2. Pernyataan Masalah (*Problem Statement*)

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka dapat ditetapkan pokok masalah yaitu belum tepat dan belum efektif dalam rekomendasi penerima bantuan siswa miskin.

3. Pertanyaan Penelitian (*Research Question*)

Pertanyaan penelitian yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :

- (a) bagaimana penerapan metode SAW untuk rekomendasi penerima bantuan siswa miskin?;
- (b) berapa tingkat ketepatan dan efektifitas penerapan metode SAW untuk rekomendasi penerima bantuan siswa miskin?.

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah menerapkan metode SAW untuk rekomendasi penerima bantuan siswa miskin. Sementara Tujuan dari penelitian ini adalah :

- (1) mendapatkan rekomendasi penerima bantuan siswa miskin yang tepat dalam pemberian bantuan;
- (2) mendapatkan proses yang lebih efektif di dalam rekomendasi penerima bantuan siswa miskin;
- (3) mengembangkan prototype aplikasi rekomendasi penerima bantuan siswa miskin;
- (4) mengukur tingkat ketepatan dan efektifitas penerapan metode SAW untuk rekomendasi penerima bantuan siswa miskin.

D. Spesifikasi Hasil Yang Diharapkan

Melalui penelitian ini diharapkan dapat terciptanya produk berupa proses dan pengembangan aplikasi sistem pendukung keputusan untuk rekomendasi penerima bantuan siswa miskin dengan spesifikasi :

- (1) sistem pendukung keputusan yang berguna bagi banyak Sekolah Menengah Kejuruan untuk rekomendasi penerima bantuan siswa miskin;
- (2) rekomendasi penerima bantuan siswa miskin dengan menggunakan SAW ini di harapkan dapat menjadi solusi dalam kebutuhan setiap Sekolah yang bermasalah dalam rekomendasi penerima bantuan siswa miskin;
- (3) sistem penyimpanan data menggunakan database MySQL.

E. Signifikasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam rangka mengembangkan penerapan teknik komputasi pemodelan Simple Additive Weighting (SAW) untuk rekomendasi penerima bantuan siswa miskin, yaitu :

- (1) manfaat teoritis dalam hasil penelitian ini bisa sebagai sumbangan ilmu pengetahuan dalam penerapan SAW untuk rekomendasi penerima bantuan siswa miskin;
- (2) manfaat praktis dalam hasil penelitian ini untuk memudahkan petugas TU dan staf program bantuan dalam pengambilan keputusan rekomendasi penerima bantuan siswa miskin;
- (3) manfaat kebijakan dalam hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam penerapan metode Simple Additive Weighting dalam rekomendasi penerima bantuan siswa miskin.

F. Asumsi dan Keterbatasan

1. Asumsi

Asumsi pengembangan dalam penelitian ini yaitu :

- (a) pengembangan aplikasi ini akan membantu pihak sekolah dalam memilih siswa yang tepat untuk mendapatkan bantuan siswa miskin, ini berarti aplikasi diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam proses rekomendasi penerima bantuan siswa miskin di sekolah menengah kejuruan;
- (b) penggunaan metode SAW (Simple Additive Weighting) dengan menghitung jumlah bobot yang tepat, ini mengimplikasikan bahwa metode ini akan digunakan dengan benar dan sesuai prosedur untuk menghasilkan hasil yang akurat;
- (c) perangkat sistem yang dikembangkan akan menggunakan metode SAW dan akan didukung oleh beberapa variabel yang relevan, ini akan

menghasilkan penilaian akhir yang digunakan untuk pengambilan keputusan penerima bantuan siswa miskin, maka aplikasi ini diharapkan dapat memberikan hasil yang tepat dan efektif dalam rekomendasi penerima bantuan siswa miskin di sekolah menengah kejuruan.

2. Keterbatasan

Keterbatasan pengembangan dalam penelitian ini yaitu :

- (a) aplikasi yang dikembangkan dalam penelitian ini terbatas pada penggunaannya untuk rekomendasi penerima bantuan siswa miskin di sekolah menengah kejuruan, maka tidak dapat digunakan untuk konteks yang berbeda, seperti penentuan penjurusan di smk;
- (b) meskipun metode SAW digunakan dalam penelitian ini, akan lebih akurat jika dikolaborasikan dengan penelitian lain, seperti penggunaan metode C4.5 atau metode yang lain, keterbatasan ini mengakui bahwa tidak ada metode tunggal yang sempurna dan kombinasi metode dapat menghasilkan hasil yang lebih baik;
- (c) aplikasi yang dihasilkan hanya membuktikan penerapan metode SAW untuk rekomendasi penerima bantuan dan tidak dapat berjalan di mobile platform.

G. Definisi Istilah atau Definisi Operasional

Definisi istilah dan definisi operasional dalam penelitian ini yaitu :

- (1) kartu KIP *adalah kartu* penanda atau identitas yang diperlukan untuk memperoleh Program Indonesia Pintar (PIP);
- (2) SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) adalah surat yang digunakan untuk keperluan keringanan biaya obat, biaya sekolah, beasiswa, peralihan BPJS dan lain-lain;
- (3) penghasilan orang tua adalah seluruh pendapatan yang diterima oleh seseorang baik yang berasal dari keterlibatan langsung dalam proses produksi atau tidak, yang dapat diukur dengan uang dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bersama maupun perseorangan;
- (4) jumlah tanggungan orang tua adalah jumlah anggota keluarga yang tidak bekerja atau belum memiliki penghasilan sendiri yang tercantum di Kartu Keluarga (KK);
- (5) status anak adalah status anak dalam keluarga;
- (6) nilai rata-rata rapot adalah nilai keseluruhan mata pelajaran selama dua semester;